

BAB II

ISU TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Indonesia sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia tentu Indonesia membutuhkan sarana & prasarana yang baik dalam menunjang berbagai sektor yang ada. Ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah namun dengan minimnya pengetahuan pengolahan dari sumber daya tersebut dan ketersediaan dana untuk pembangunan fasilitas sarana & prasarana yang kurang memadai membuat Indonesia membutuhkan bantuan asing untuk pembangunan di Indonesia.

A. Kondisi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Kebutuhan Indonesia akan investasi asing untuk dapat membentuk infrastruktur negara yang mana dampak dari perkembangan infrastruktur yang ada akan memberikan dampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan Indonesia itu sendiri, namun kendala yang dihadapi negara berkembang khususnya Indonesia adalah keterbatasan modal, disisi lain disamping fenomena diatas, sebuah negara memerlukan sumber permodalan yang rasional agar kegiatan yang mereka rancang dapat memberikan feedback yang positif terhadap perkembangan Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan investor untuk masuk kedalam negeri agar dapat berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai dunia, terjadi pula arus tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut

berlangsung sangat cepat karena investasi yang dilakukan di negara lain membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pihak pemilik modal dan investor. Artinya untuk menjaga kelangsungan usaha dan investasi yang dilakukan oleh investor, investor membutuhkan tenaga yang terampil yang bisa dipercaya untuk mengelola dan mengamankan investasi yang mereka lakukan di negara tujuan seperti Indonesia, untuk kepentingan tersebut juga para pemilik modal atau investor dari luar negeri membawa serta tenaga kerja dari negara mereka atau negara lain untuk bekerja di Indonesia.

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di suatu negara termasuk Indonesia pada umumnya lebih banyak dikaitkan dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja dan tingkat upah, serta devisa yang terbang keluar negeri dan faktor budaya. Yang jelas sulit untuk dihindari bahwa pada lingkup pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau yang memerlukan ketrampilan khusus umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Disamping itu kehadiran Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak positif terhadap pekerja lokal seperti *Transfer Of Knowledge* dan menjadi modal untuk bisa bekerja pada kelas level Internasional. (Fahmy, 2015)

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Fenomena itu terjadi karena kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur yang selalu meningkat setiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat dari tabel tenaga kerja asing di Indonesia di tahun 2015

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Tahun 2015



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah total 77.150 jiwa dimana jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia mayoritas berasal dari Tiongkok dengan jumlah 17rb jiwa kemudian disusul dengan tenaga kerja asing asal Jepang di urutan kedua dengan jumlah sekitar 10rb jiwa dan selanjutnya tenaga kerja asing yang berada di Indonesia banyak didominasi oleh tenaga kerja asing yang berasal dari Asia.

Kemudian di tahun 2016 tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia berjumlah 80.337 jiwa dimana angka tersebut mengalami jumlah peningkatan sebesar 4,1 persen dari tahun 2015, dan masih di dominasi oleh pekerja asing asal Tiongkok, di tahun 2017 tren peningkatan pekerja asing di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dimana jumlah pekerja asing di tahun 2017 yang masuk ke Indonesia berjumlah sebesar 85.997 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 6,9 persen dari tahun 2016 dimana jumlah tenaga kerja asing masih di puncak oleh Tiongkok dengan 24rb kemudian diikuti oleh Jepang dengan 13.540 jiwa, hal tersebut terjadi karena keputusan presiden Joko Widodo

yang mengundang investor asing dengan mempermudah syarat bagi investor asing untuk melakukan investasinya di Indonesia agar ekonomi dapat bergerak cepat bagi Indonesia.

Para pekerja asing tersebut rata-rata berusia 25-50 tahun dengan pendidikan S2 sebanyak 62% kemudian S1 sebanyak 32% dan sisanya adalah para pekerja unskill dengan rata-rata memiliki pendidikan SMP-SMA atau sederajat, tenaga kerja asing di Indonesia di dominasi oleh pria dengan persentase mencapai 97%, para tenaga kerja asing tersebut banyak yang menduduki jabatan-jabatan yang tidak dapat di isi oleh pekerja lokal dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia Indonesia dan minimnya pengetahuan tenaga kerja lokal tentang penggunaan alat-alat.

B. Fenomena Tenaga Kerja Asing Tiongkok di Indonesia

Kepemimpinan Indonesia di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah sempat membekunya hubungan Indonesia dengan Tiongkok di era Orde Baru dibawah pimpinan presiden Soeharto karena isu komunisme yang pada saat itu memicunya sebuah kejadian kelam bagi Indonesia yaitu G30SPKI, dibawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal tersebut dibuktikan dengan kemitraan strategis yang dibentuk oleh Indonesia dengan Tiongkok yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Strategic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Tiongkok pada tanggal 25 April 2005 pada saat presiden Tiongkok saat itu yaitu Hu Jin Tao mengunjungi Indonesia. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa poin-poin yang mencakup kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan

infrastruktur, bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial dan budaya. (Wardana, 2009)

Kemudian di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia bergabung dengan ACFTA (Asean China Free Trade Agreement) sebuah langkah gerakan dalam bidang ekonomi kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok, ACFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas yang berlaku antar negara anggota ASEAN dengan Tiongkok yang didalamnya terdapat kesepakatan mengenai penghapusan tarif pajak dan bea masuk dengan maksud untuk mempermudah kegiatan perdagangan internasional, Indonesia melihat peluang ini sebagai cara agar anggota dari organisasi dapat memungkinkan untuk menjadi suatu kawasan kerjasama yang efektif. (Chandra, 2010)

Setelah bergabungnya Indonesia kedalam Forum ACFTA di tahun 2010, lonjakan pekerja asing asal Tiongkok meningkat sebanyak 2,5 persen dari tahun 2009 yang berjumlah 7522 orang, banyak dari pekerja tersebut yang mengisi posisi tenaga ahli dalam proyek-proyek di Indonesia. Fenomena peningkatan jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun di angka 2-3persen, beberapa perjanjian baru seperti peningkatan *strategic partnership* menjadi *comprehensive strategic partnership* yang mana perjanjian tersebut membuat Indonesia menjadi ikut serta dalam zona perdagangan bebas dengan Tiongkok yang berimbas pada banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Kemudian terpilihnya presiden Joko Widodo pada tahun 2014 untuk menggantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah Indonesia pada periode sebelumnya tentu membuat perbedaan dalam pengambilan kebijakan. Fokus utama presiden Joko Widodo yang tertuang dalam *Nawacita* yaitu adalah

pembangunan infrastruktur dilihat oleh presiden Joko Widodo sebagai kunci untuk memajukan ekonomi meskipun efek dari pembangunan infrastruktur baru akan dirasakan masyarakat dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan.

Presiden Joko Widodo menggunakan dasar yang berbeda dalam melihat rendahnya minat ekonomi yang terjadi sekarang. Menurutnya ekonomi akan kembali tumbuh apabila didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai dan hal tersebut dianggap oleh presiden Joko Widodo dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan ekonomi yang diawali oleh pembenahan infrastruktur. Sebuah keputusan yang berbeda juga dibuat oleh presiden Joko Widodo terhadap subsidi, banyak subsidi yang dicabut dan dananya dialihkan ke bidang pembangunan lain seperti pencabutan subsidi bahan bakar premium dan pencabutan beberapa subsidi lainnya, presiden Joko Widodo menganggap jika subsidi hanya memanjakan masyarakat dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan soal kemiskinan karena hanya bisa dirasakan satu sampai lima tahun saja namun dengan pembangunan infrastruktur dinilai dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan Tiongkok sebagai investor utama dengan syarat Tiongkok dapat membawa turut serta alat dan tenaga kerjanya berasal dari Tiongkok. Dengan banyaknya jumlah kerjasama proyek yang dibangun antara Indonesia dengan Tiongkok menyebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia, persentase jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia meningkat dari jaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 2x lipatnya, hal tersebut disebabkan persyaratan membawa

tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diajukan oleh investor asal Tiongkok, hingga bulan juni 2018 tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok mencapai 26rb jiwa atau sekitar 38% dari jumlah total seluruh pekerja asing yang bekerja di Indonesia, beberapa tenaga kerja asing asal Tiongkok bekerja dalam proyek proyek pembangunan infrastruktur seperti TOL, Bandara, Pelabuhan dan beberapa pembangkit listrik tenaga uap. (Adam, 2018)

Yang terbaru mengenai fenomena tenaga kerja asing asal Tiongkok adalah dengan didatangkannya 102 tenaga ahli Tiongkok dari berbagai bidang seperti kelistrikan, perkeretapihan dan arsitek pembangunan rel untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berjarak sejauh 142Km yang diperkirakan hanya membutuhkan estimasi waktu kereta hanya 45 menit, lebih cepat 30 menit jika ditempuh dengan menggunakan kereta api biasa kelas eksekutif, atau 1 jam lebih cepat dari kendaraan bermotor, dengan adanya gagasan mengenai terbentuknya kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang pada awalnya muncul di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun pada saat itu rujukan kerjasama untuk pembuatan kereta cepat mengarah terhadap jepang yaitu dengan perusahaan *Japan International Cooperation Agency*, namun di era presiden Joko Widodo kesepakatan tersebut tidak tercapai dan beralih dengan terbentuknya kerjasama antara *China Railway Construction Limited* dan *PT. Relsteel Industry Indonesia*. (Suhendra, 2016)

Dengan banyaknya kerjasama baru hubungan Indonesia dengan Tiongkok kemudian muncul isu bahwa masuknya sebanyak 10 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok beredar di masyarakat, Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly kemudian membantah isu masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok sebanyak 10 juta

tidaklah benar, karena jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok pada masa Joko Widodo di tahun 2015-2018 hanya mencapai kisaran 16-27ribu jiwa dan keseluruhan Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia berada di kisaran 70 ribuan.

Keputusan mengenai penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia selain karena faktor investasi yang datang dari investor asal Tiongkok namun juga ada beberapa pertimbangan lain yang menyebabkan Indonesia menerima pekerja asal Tiongkok yaitu karena dianggap para pekerja asal Tiongkok cekatan dan rajin serta kompetensi mereka sudah memenuhi standart dari apa yang pemerintah tetapkan, hal tersebut dibuktikan dengan rampungnya bayak proyek tol, bandara dan pembangkit listrik yang sesuai dan tepat waktu sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Kemudian upah para pekerja asal Tiongkok tergolong murah jika dibandingkan dengan upah para tenaga kerja asing asal negara lain misal jepang dalam bidang yang sama. Upah pekerja Tiongkok hanya 20% diatas upah UMR perdaerah untuk pekerja paketan buruh, sedangkan untuk tenaga ahli, pekerja dari negara lain seperti jepang akan mematok harga 2x lipat dari upah yang diajukan oleh tenaga kerja asing asal Tiongkok. (Djafar, Asean & Dinamika Asia Timur, 2016)

Kehadiran tenaga kerja asing juga menimbulkan beberapa problem permasalahan yang perlu ditanggapi oleh pemerintah secara serius dan instansi terkait. Kehadiran mereka telah menimbulkan berbagai permasalahan terhadap negara tujuan (Indonesia). Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkanya antara lain yang berhasil di identifikasi adalah: *Pertama*, berkurangnya peluang kesempatan bagi tenaga kerja lokal karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. *Kedua*, penggunaan tenaga kerja asing dengan upah murah telah mengurangi penerimaan pemerintah dalam

sektor perpajakan karena mereka kebanyakan dibayar dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Penggunaan tenaga kerja asing murah ini telah mengurangi minat pengusaha untuk menggunakan mesin-mesin dan peralatan dalam proses produksi. *Ketiga*, meningkatkan aktifitas persaingan dalam mendapatkan fasilitas publik seperti perumahan, air minum, listrik dan lain-lain. *Keempat*, terjadinya eksploitasi tenaga kerja oleh majikan yang mengabaikan hak-hak buruh, seperti pembayaran bonus dan kebebasan menjalankan ibadah.

Beberapa modus dan model permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia yang sempat diberitakan oleh media massa adalah sebagai berikut: *Pertama*, tenaga kerja asing yang dipanggil oleh perusahaan baru namun belum memiliki IMTA(izin menggunakan tenaga kerja asing), *Kedua*, Meskipun IMTA telah habis namun tidak sedikit majikan atau pemilik modal yang tetap mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut, *Ketiga*, perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing menyalahgunakan aturan tentang IMTA, misalnya pekerjaan darurat yang masa berlakunya hanya satu bulan dan pekerjaan sementara yang masa berlakunya 6 bulan, sudah habis masa kerjanya namun tidak kembali ke negara asalnya. *Keempat*, Perusahaan mendatangkan TKA dengan menggunakan visa turis tanpa memiliki IMTA dan menggunakan visa turis tapi bekerja di salon yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai prostitusi, pengedar narkoba dan kejahatan bidang elektronik. *Kelima*, Tenaga kerja asing bisa dikatakan kasus khusus masuk ke Indonesia melalui perusahaan PMA yang membangun berbagai infrastruktur sendiri dengan hanya mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak mahir yang digaji dibawah penghasilan kena pajak. Tujuan dari modus penggunaan tenaga kerja asing seperti ini tidak hanya memanfaatkan fasilitas publik secara gratis dan menghambat kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal,

tetapi juga berupaya untuk menghindari pajak. Keenam, banyak juga ditemui modus memiliki visa kerja, tapi bekerja tidak sesuai dengan IMTA yang dimilikinya, dan lokasi kerja fiktif. (Jazuli, 2018)